

**KEBIJAKAN TIDAK DEMOKRATIS,
DAN PELUANG EKONOMI
(Studi Komparatif Indonesia dengan Negara-Negara Maju)**

Deysi Livy Natalia Tampongangoy

Abstract: The state republic Indonesia Poverty "and" injustice "is the reason most often cited for the disappointment of the people against the democratic system. Not much different from the developed countries and other developing In some countries, instead of a bright economic as promised by the leaders of democracy the newly elected, but the people even watched the deteriorating economic conditions, the gap increased income, and control of economic opportunities by elites. in other places, where the Gross Domestic Product (GDP), the upper middle class to reap the greatest benefits, while poor remain poor

Keywords: Policy, Economic Opportunities

PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia dari sekian pendapat umum terbaru dan sejumlah negara yang sedang membangun demokrasinya, tampaknya menunjukkan adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan untuk meninggalkan reformasi dan kembali ke pemerintahan otoriter. Namun demikian, ketidakpuasan rakyat ini tidak disebabkan oleh hilangnya kepercayaan kepada prinsip-prinsip dan manfaat demokrasi, tetapi karena frustrasi terhadap reformasi yang berjalan lambat. Banyak orang, karena frustrasi terhadap kondisi ekonomi mereka, percaya bahwa sebuah pemerintahan yang kuat dan terpusat dapat mengatasi masalah dengan cepat, keliru menyalahkan tidak adanya perbaikan masalah kesenjangan ekonomi dalam gerakan reformasi. Dalam banyak kasus, demokrasi yang diusung oleh rezim ini memang tidak melebar melampaui kotak suara pemilihan umum, dan reformasi sendiri dilupakan atau dilaksanakan secara tidak penuh. Bahkan tidak di pungkiri bahwa di Negara Indonesia bisa terjadi di tundanya sebuah demokrasi dan bisa saja berubah – ubah. Menurut keinginan para elit – elit politik. Sampai sejauh ini bisa membingungkan masyarakat umum. Sementara itu, negara-negara yang telah mengalami demokratisasi secara lebih penuh dan transparan dapat menuai buah ekonominya. Oleh karena itu, bukannya meninggalkan reformasi demokrasi dan

melalaikan hak-hak mereka karena mengharapkan terjadinya perbaikan ekonomi secara cepat, rakyat hendaknya bersiteguh untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang menopang bekerjanya demokrasi dan ekonomi pasar.

laporan yang baru saja diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan gambaran yang agak mencemaskan mengenai masa depan demokrasi di beberapa wilayah suatu Negara. Katakanlah Negara Indonesia tidak jauh berbeda dengan Negara – Negara berkembang lainnya. wilayah tersebut. Data dalam laporan tersebut menunjukkan, seperti juga halnya artikel di media cetak, bahwa banyak orang kecewa dengan demokrasi di Amerika Latin, sebab pemerintah yang dipilih secara demokratis gagal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial warganya. Fakta yang mengkhawatirkan itu adalah bahwa, menurut laporan tersebut, mayoritas rakyat lebih menyukai rezim otoriter daripada demokrasi karena seorang diktatorlah yang akan mampu memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Hampir 60% pemimpin politik yang menjadi responden setuju dengan kegagalan demokrasi tersebut, sambil menyatakan bahwa kinerja partai-partai politik memang tidak memenuhi harapan.

sejumlah negara berkembang di bagian lain di dunia menunjukkan sikap umum yang sama, karena rakyatnya

mendukung rezim di mana para pemimpinnya memiliki otoritas yang kuat. Pandangan bahwa seorang pemimpin yang kuat seorang diktator yang baik hatidapat membawa negara kepada stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi, kembali dianut oleh banyak negara. .

Lebih lanjut apabila kita melihat Negara Indonesia dengan negara-negara lainnya banyak negara demokratis elektoral yang lebih dekat ke rezim otoritarian daripada liberal demokratis. Negara-negara republik bekas Uni Soviet, yang kebanyakan sekarang diperintah oleh para pemimpin yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang sangat besar, mengilustrasikan aspek yang sedang muncul ini dalam krisis demokrasi. Di sana, demokrasi elektoral masih tetap sebagai nama, tetapi pemerintahan yang sesungguhnya sering tidak demokratis. Di Rusia, misalnya, Presiden Vladimir Putin menikmati 70% dukungan rakyat, sementara rezimnya seringkali dianggap sebagai otoritarian oleh semua negara lain di dunia. Pada saat yang sama, menurut indikator tata kelola (*governance*) Global Barometer, hanya 30% rakyat Rusia yang puas dengan kinerja demokrasi mereka, sementara itu hampir 70% menolak kediktatoran. Mengapa ada dukungan yang begitu besar terhadap rezim sekarang di tengah ketidakpuasan yang meluas terhadap demokrasi? Mungkin karena tidak adanya calon alternatif lain, atau rakyat Rusia lebih menyukai demokrasi dengan kekuasaan yang besar pengalaman Rusia dengan demokrasi liberal terasa pahit bagi banyak pihak karena sering munculnya kekacauan dalam masa pemerintahan Yeltsin di tahun 1990-an. Tampaknya memang begitulah halnya, mengingat kebijakan terbaru Presiden Putin yang dimaksudkan untuk memperkuat Negara seperti membatasi kebebasan media, menghapus pemilihan gubernur, serta melakukan kontrol terhadap pengadilan tinggi tidak mendapat penolakan yang berarti dari rakyat.

Berbagai kejadian terbaru di Georgia mengilustrasikan gejala yang menyulitkan: ketika para pemimpin yang terpilih melalui pemilihan yang bebas membuat janji-janji manis untuk rakyat, tetapi kemudian memperbesar kekuasaan mereka dengan cara yang tidak demokratis begitu mereka mulai menjabat. Dengan tidak adanya mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menuntut pejabat pemerintah agar bertanggung gugat, perbuatan semacam itu berlangsung tanpa diketahui umum. Akibat dari perbuatan semacam itu dapat dilihat di Belarus, di mana Presiden Aleksandr Lukashenko terpilih secara sah dalam suatu pemilihan umum pada pertengahan tahun 1990-an, tetapi kemudian membangun suatu rezim tertutup pada tahun-tahun berikutnya, dengan cara mengontrol media dan perekonomian secara ketat dan membubarkan segala bentuk oposisi demokratis. Pada tahun 2004, ia melakukan referendum nasional untuk memperpanjang mandat kepresidenannya melalui amandemen konstitusi. Sekalipun referendum itu sendiri tidak konstitusional dan diprotes keras oleh oposisi yang sudah lemah, namun tetap berlangsung. Presiden Lukashenko memperoleh suara mayoritas di tengah-tengah dugaan terjadinya berbagai pelanggaran dalam proses pemilihan. Melemahkan oposisi dengan cara mencegah mereka mengikuti pemilihan dan memenjarakan mereka atas dasar pelanggaran yang sesungguhnya tidak dilakukan, agaknya menjadi cara yang efektif bagi pemerintah sekarang. Menurut survai yang dilakukan sebelum referendum oleh Independent Institute of Socio Economic and Political Studies (IISEPS), lebih dari 80% rakyat tidak melihat adanya calon alternatif.

Di Amerika Latin, pemberlakuan kebijakan yang tidak demokratis dan berimplikasi jauh ke depan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis, sudah umum dilakukan. Karena kebanyakan negara-negara

tersebut meninggalkan rezim militer dan otoritarian dalam dua dasawarsa terakhir dan berubah menjadi demokratis dan ke ekonomi pasar secara sendiri-sendiri, maka pengalaman dan hasilnya berbeda-beda. Beberapa negara di wilayah itu, seperti Kosta Rika, relatif berhasil mendemokratisasikan diri dan mencapai stabilitas ekonomi, sementara yang lain, seperti Venezuela dan Uruguay, telah terjebak dalam krisis ekonomi dan politik. Namun angka statistik yang mencemaskan yang mengecilkan kemajuan demokrasi secara keseluruhan adalah tetap tingginya angka kemiskinan antara 30% dan 50% dari penduduk di wilayah ini hidup dalam kemiskinan.

Frustrasi terhadap demokrasi sedang mengubah agenda pembangunan. Sejak berakhirnya Perang Dingin, gencarnya promosi demokrasi telah menghasilkan laporan-laporan utama di sural kabar mengenai konsolidasi demokrasi. Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an demokratisasi melanda seluruh dunia dan harapan terhadap manfaat demokrasi cukup tinggi. Banyak orang yang turun ke jalan untuk menuntut perubahan dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas, sambil membayangkan stabilitas, keterwakilan yang adil, dan kemakmuran ekonomis akan hadir bersama demokrasi. Para ahli dari negara-negara maju pun seringkali memiliki harapan yang sama. Banyak orang yang mengharapkan terjadi perubahan dalam sekejap. Sekalipun masyarakat dalam beberapa negara telah dapat menuai buah dari sistem ekonomi pasar dan demokrasi, tetapi di tempat lain harapan tersebut belum juga terwujud. Di negara-negara itu, proses privatisasi memperburuk pengangguran, reformasi demokrasi gagal memberikan hak suara pada rakyat dalam pembuatan kebijakan, kebebasan bicara tidak terjadi, akses ke informasi tetap terbatas, dan peluang ekonomi masih kurang.

Di Negara republic Indonesia "Kemiskinan" dan "ketidakadilan"

merupakan alasan yang paling sering disebutkan untuk kekecewaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan Negara-negara maju dan berkembang lainnya Di beberapa negara, bukannya ekonomi yang cerah seperti yang dijanjikan oleh para pemimpin demokrasi yang baru terpilih, tetapi rakyat bahkan menyaksikan kondisi ekonomi yang memburuk, kesenjangan pendapatan yang meningkat, dan penguasaan kesempatan ekonomi oleh para elite. Di tempat lain, di mana Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, kelas menengah atas meraup keuntungan paling besar, sementara yang miskin tetap miskin.

Namun beberapa kritik mengenai rendahnya pertumbuhan ekonomi mungkin tidak berdasar, sebab pendapatan memang naik dan tingkat kemiskinan menurun di banyak negara yang sedang mendemokratisasikan diri sepanjang tahun 1990-an. Masalahnya adalah bahwa pendapatan tidak naik cukup tinggi dan tingkat kemiskinan tidak menurun secepat yang diharapkan, dan walaupun ada kemajuan ekonomi tetapi kesenjangan antara yang kaya dan miskin melebar. Dalam banyak kasus, negara yang lebih maju tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang, sehingga memperlebar jurang pembangunan dan membuat rakyat frustrasi. Dan ketika krisis finansial melanda banyak negara yang kondisinya lemah dan tidak stabil, keuntungan awal dari demokrasi juga terhapus, yang terutama merugikan kelas menengah bawah.

Rakyat di negara demokrasi baru menyadari bahwa dialog yang konstruktif dengan pejabat publik tidak mungkin dilakukan. Dengan begitu, buah utama dari demokrasi, yakni partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, tidak dapat dipetik. Masalah dalam struktur politik semacam itu berakibat pada perkembangan ekonomi yang rendah. Tingginya tingkat korupsi dan ketidakpercayaan kepada lembaga politik terus berlanjut dan peluang ekonomi tetap

jarang di banyak negara. Sebagai akibatnya, antagonisme terhadap sistem demokrasi terus meningkat. Namun demikian, alasan mengapa banyak orang tidak menikmati buah sistem demokrasi dan ekonomi pasar sementara para politisi dan elite menikmati, terletak tidak pada buruknya demokrasi sebagai sebuah konsep dan lembaga, sebagaimana dituduhkan oleh pihak oposisi, namun terletak pada buruknya sistem lama yang ditinggalkan yang memang tidak demokratis. Mayoritas negara demokrasi yang gagal untuk mendapatkan legitimasi, bukanlah negara yang benar-benar demokratis. Dalam banyak kasus, sifat demokratis dari rezim-rezim itu tidak melebar melampaui kotak suara. Rakyat mungkin sudah menyalurkan keinginannya untuk memilih pemimpin mereka, tetapi mereka tidak melihat adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik begitu pemilihan umum usai. Kenyataannya, di negara-negara berkembang banyak pemimpin politik yang kemudian memperketat pemerintahannya setelah memperoleh kekuasaan, yang menegaskan ironi pemilihan umum partai-partai politik menyusun kebijakan hanya untuk memenangkan pemilihan dan mendapatkan jabatan, bukannya ikut pemilihan umum untuk menerapkan kebijakan. Paradoks rezim-rezim yang terpilih secara demokratis dengan kebijakan yang tidak demokratis, menjadi kenyataan di banyak negara berkembang dan dalam transisi.

Penyebab lain dari kekecewaan rakyat terhadap demokrasi adalah harapan rakyat yang agak irasional untuk mendapatkan dividen demokrasi. Banyak orang berpikir bahwa begitu pemimpin yang demokratis mulai menjabat dan pemerintah melonggarkan kendali ekonominya, pasar akan tinggal landas, investasi akan mengalir masuk, kesempatan kerja bertambah, dan pendapatan naik. Tetapi pasar tidak akan tercipta dalam keadaan vakum dan tidak

akan tumbuh atas dasar keinginan pemerintah. Sebaliknya, pasar membutuhkan struktur yang baik, aturan yang jelas, dan manajemen serta pelaksanaannya yang efektif.

Demokrasi bisa bekerja, dan transisi menuju sistem demokrasi dapat menciptakan partisipasi rakyat dan peluang ekonomi yang luas. Jika demokrasi diperlakukan dengan benar, ia akan bekerja dengan benar. Negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang telah bergabung dengan Uni Eropa merupakan contoh hidup. Mereka telah melewati proses transisi dan sekarang dalam tahap kedua reformasi untuk memperkuat lembaga politik dan ekonomi mereka. Negara-negara itu hanya sedikit mendapat perlawanan rakyat terhadap sistem demokrasi.

Maka, sementara banyak survei menunjukkan bahwa rakyat lebih menyukai sistem demokrasi dibandingkan dengan sistem politik lain, survei yang sama juga menunjukkan bahwa rakyat kecewa terhadap sistem demokrasi mereka sendiri, terutama karena pengalaman buruk mereka. Kemudian rakyat mencari sistem politik lain, dan rezim otoriter diidentifikasi sebagai pilihan berikutnya yang paling baik untuk menciptakan perbaikan ekonomi secara cepat.

Kekecewaan rakyat seperti itu biasanya tidak dialamatkan kepada gagasan tentang demokrasi itu sendiri, karena rakyat masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem politik yang lebih baik secara konsep, tetapi kepada kegagalan upaya demokratisasi untuk menciptakan peluang ekonomi yang memadai. Dengan demikian, kemampuan sebuah rezim untuk membiarkan rakyatnya untuk menentukan sendiri nasibnya, pada gilirannya dapat membuahkan legitimasi dan keberlangsungan rezim itu sendiri, dan rezim yang dapat menciptakan lingkungan bisnis yang menyenangkan dan

mendorong semangat berusaha rakyatnya, pada akhirnya akan berhasil.

Demokrasi

Pemerintah otoritarian tidak dapat menciptakan lingkungan bagi pasar untuk tumbuh dan berkembang sebaliknya, mereka menjadi pencari rente dan dipengaruhi oleh kepentingan dari dalam dirinya, yang menjadikan mereka terlalu banyak mengatur dan mengarahkan kegiatan pasar. Akibatnya, kolusi dan nepotisme yaitu kompetisi yang tidak adil mengendalikan aktivitas pasar dalam lingkungan seperti ini, dan korupsi merajalela.

Pengalaman Filipina di bawah Ferdinand Marcos, Slovakia di bawah Vladimir Meciar, Rumania di bawah Nicolae Ceausescu, Chili di bawah Augusto Pinochet, Rusia di bawah komunisme, dan sekelompok negara-negara lain yang otoritarian atau semioritarian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai dalam masyarakat yang tertutup. Walaupun ada sejumlah negara otoritarian yang menikmati pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tersebut biasanya hanya sebentar dan umumnya hanya menguntungkan kalangan elite yang terbatas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebanyakan rezim otoritarian roboh karena tekanan ketidakpuasan rakyat terhadap perekonomian mereka dan prospek ekonomi yang tidak jelas.

Sebuah sistem otoritarian bukanlah jawaban untuk mengatasi masalah ekonomi, maka sebaliknya, sistem demokratis dirancang untuk mengizinkan sektor swasta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, yang lebih mampu untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang baik yang dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan sistem demokrasi dapat diperoleh

dengan menelaah teori pembangunan kelembagaan.

Peluang Ekonomi

Bagaimana Strategi untuk menentukan harga secara tepat dibangun berdasarkan asumsi bahwa kekuatan pasar akan mendorong negara menuju kemakmuran jika hambatan pasar dihilangkan. Asumsi tersebut tidak salah, tetapi pada hakikatnya ia tidak berjalan di negara berkembang karena mekanisme pasar tidak ada di sana. Strategi itu diganti dengan teori tentang penentuan kebijakan yang tepat, yang sering diacu sebagai salah satu sebab kegagalan negara-negara demokrasi baru di Amerika Latin untuk mendorong dan mengamankan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama tahun 1980-an dan 1990-an. Tumpuan Amerika Latin pada Konsensus Washington membawa mereka pada harapan-harapan palsu bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika mereka sekedar mau mengadopsi program reformasi yang telah bekerja efektif di negara

Negara-negara yang menerima rekomendasi ini mengira bahwa apa yang harus mereka perbuat adalah sekedar mengkodifikasi kebijakan-kebijakan tersebut, lalu membiarkan kekuatan pasar bekerja sendiri. Penting untuk dicatat, negara-negara ini hendaknya jangan disalahkan karena memiliki harapan seperti itu, sebab begitulah para penasihat ahli mengemas program reformasinya. Kemudian argumen Douglass North mengenai reformasi kelembagaan memperoleh perhatian yang semakin besar dan seterusnya merombak pemahaman tentang kebijakan pembangunan. Masalah yang terjadi di adalah bahwa kebijakan yang berorientasi pasar diterapkan dalam lingkungan yang rusak. Kebijakan memerlukan pondasi kelembagaan yang kuat, dan pondasi itulah yang retak berat di kebanyakan negara Amerika Latin. Pendekatan reformasi yang lama tidak memperhatikan arti

penting lembaga, baik yang formal maupun informal. Lembaga formal termasuk undang-undang dan peraturan yang tertulis dan dijalankan. Lembaga informal terutama berupa aturan kultural yang memungkinkan pasar dan masyarakat dapat berfungsi. Misalnya, lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu lembaga informal yang melemahkan usaha reformasi pasar awal di Amerika I.atin.

Dalam ketiadaan lembaga-lembaga yang kuat, reformasi pasar seringkali menimbulkan kekacauan serta hasil yang tidak konsisten. Misalnya, program privatisasi seringkali gagal karena tidak didukung oleh undang-undang dan peraturan yang mengendalikan kegiatan pasar, seperti izin ekspor/impor dan kewajiban pembuatan surat kontrak, pasar modal, dewan direktur, standar akuntansi, dan mekanisme keuangan. swastanisasi sektor energi tidak menghasilkan penurunan harga serta efisiensi yang lebih besar sebagaimana diharapkan karena peraturan yang mengendalikan pasar tidak diubah untuk menandai masuknya pemain sektor swasta, sehingga mendorong sektor swasta untuk bersaing dalam sistem yang baru tetapi di bawah aturan lama yang tidak cocok.

Hubungan antara sistem demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah masalah pokok dari diskusi tentang lembaga ini. Jawaban bagi pertanyaan dasar dalam karya Douglass North, "mengapa ada negara yang menjadi kaya, sedang yang lain tetap miskin?" adalah sederhana saja mereka menjadi kaya karena menciptakan lembaga yang memandu, bukan mengendalikan atau mengatur secara berlebihan, kegiatan pasar. Tetapi proses pengembangan lembaga yang memperhitungkan nilai-nilai pengetahuan lokal memerlukan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dengan lembaga tersebut sehari-hari. Lembaga tidak dapat begitu saja diciptakan berdasarkan keputusan subyektif pejabat publik; jika demikian

para pembuat kebijakan akan gagal untuk menanggapi kebutuhan serta keprihatinan para pengusaha dan rakyat. Oleh karena itu, dalam merancang reformasi ekonomi, komunitas bisnis harus diberi akses kepada pembuat kebijakan untuk menyam-paikan pandangan dan rekomendasi sektor swasta.

Sistem demokrasi memungkinkan partisipasi sektor swasta secara luas dalam kebijakan publik; sedangkan rezim otoritarian tidak. Dalam rezim otoritarian, karena tiadanya partisipasi sektor swasta, pejabat pemerintah tidak memiliki akses kepada informasi termasuk pengetahuan tentang kelemahan sistem pemerintahannya dan karena itu kebijakan yang dikeluarkannya kecil kemungkinan dapat mendorong kegiatan pasar. Begitu juga, dalam sistem otoritarian pejabat pemerintah jarang bertanggung gugat atas tindakannya, sehingga mereka memiliki peluang besar untuk menyalahgunakan kekuasaannya mengeluarkan kebijakan untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya atas beban orang lain. Politik mementingkan diri sendiri seperti itu terus bertahan selama pejabat dalam eselon yang lebih tinggi memperoleh bagian dari rente yang didapat oleh para kroninya.

Menata dengan baik

Lantas, mengapa rakyat di banyak negara demokrasi berkembang tidak dapat menik-mati pertumbuhan ekonomi yang seharusnya diberikan oleh demokrasi? Sebabnya adalah bahwa lembaga ekonomi membutuhkan demokrasi yang berjalan dengan baik, dan ini merupakan kelemahan lembaga demokrasi yang menggerogoti prospek pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Asosiasi sektor swasta, *think tank*, media yang investigatif, dan organisasi masyarakat sipil yang lain di banyak negara sekarang menjadi lebih pandai untuk mengidentifikasi prioritas untuk reformasi dan lembaga-lembaga yang perlu dibangun kembali. Ketika

kebutuhan terhadap undang-undang dan peraturan dari dalam negeri dibawa ke proses pembuatan kebijakan, biasanya tantangannya adalah bagaimana menyampaikan informasi yang bermutu kepada para pembuat kebijakan, serta membujuk mereka agar mau menerima rekomendasi. Namun demikian, sekalipun bila kampanye advokasi berhasil, bila para anggota legislatif mau mendengarkan suara sektor swasta dan rakyat, dan bila undang-undang baru telah disusun, reformasi sering gagal karena lemahnya implementasi. Lebih-lebih, pejabat pemerintah seringkali tidak dapat dituntut untuk bertanggung gugat atas pelaksanaan hukum atau peraturan secara selektif, karena mekanisme yang memadai untuk melakukan hal itu tidak ada.

Sementara meningkatnya penekanan pada aspek kelembagaan telah mendorong agenda pembangunan dalam beberapa dasawarsa yang lalu, suatu prinsip tentang tata kelola yang demokratis kini sedang membentuk pemahaman yang baru kepada konsolidasi demokrasi. Argumen pokok dalam tata kelola yang demokratis adalah bahwa demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh pemilihan yang bebas dan jujur. Konstituen hendaknya tidak memberikan cek kosong kepada para pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, demokrasi harus tetap berjalan setelah pemilihan umum selesai para pemimpin harus bertanggung gugat atas penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka, informasi harus dapat diperoleh dengan mudah, serta peraturan dan undang-undang harus ditegakkan secara adil. Tata kelola yang demokratis terutama berfungsi untuk memperkuat hubungan antara sistem demokrasi yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi, karena ia mencoba untuk memperluas konsep reformasi kelembagaan dan mengajukan pertanyaan tentang implementasi yang adil dari reformasi semacam itu.

Lemahnya pelaksanaan dan tiadanya mekanisme pertanggunggugatan di banyak demokrasi menjadikan rakyat terasing dari proses demokrasi, dan memaksa mereka untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan kotak suara. Dalam suatu peristiwa yang menyedihkan, baru-baru ini war-ga sebuah kota di Peru menghukum gantung walikotanya karena ia gagal untuk memenuhi janjinya untuk melakukan reformasi. Tetapi perbuatan ekstrim semacam itu adalah cerminan dari fenomena kemarahan yang jauh lebih besar. Rakyat di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika Latin, sudah tidak sabar dengan para pemimpin yang terus menjalankan pemerintahan korup, yang merampok kesempatan rakyat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Akibat dari kekecewaan rakyat terhadap demokrasi biasanya tidak jauh lebih baik, seiring dengan tampilnya pemimpin yang kerakyatan ke panggung kekuasaan. Pemimpin semacam itu berjanji untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan serta menaikkan taraf kehidupan rakyat, tetapi seringkali mereka tidak memiliki kebijakan ekonomi yang baik dan, karena sikap nasionalismenya tinggi, memilih tetap mempertahankan kendali yang ketat dalam bidang politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, hendaknya demokrasi jangan ditinggalkan dan menengok kembali ke rezim otoritarian, tetapi berikanlah penekanan pada pengembangan kelembagaan yang dapat menghidupkan demokrasi dan pasar secara benar. Pembangunan demokrasi adalah suatu proses yang tidak akan selesai dalam semalam, dan ekonomi pasar tidak akan tumbuh sendiri karena ada izin untuk itu. Akhirnya, proses itu berarti membangun lembaga-lembaga yang dapat menampung partisipasi rakyat yang lebih besar dalam tata kelola dan memastikan penegakan hukum dan peraturan secara adil.

Yang harus di butuhkan

Di Negara Indonesia Untuk memastikan bahwa pemerintah dapat memerintah secara demokratis perhatian khusus harus diberikan pada bagaimana keputusan pemerintah dilaksanakan dari hari ke hari. Korupsi, yang merupakan salah satu masalah pembangunan yang penting, adalah contoh yang sangat baik mengenai jurang realitas yang menganga antara kebijakan nasional dan tata kelola lokal. Kebanyakan pemerintah pada tingkat nasional akan menjadikan korupsi sebagai isu utama dalam pemilihan umum, dengan berjanji akan mengurangi korupsi dan mengembalikan kepercayaan rakyat dalam sistem yang adil dan transparan. Namun demikian, berbagai upaya seringkali gagal untuk mencapai hasil sebagaimana diharapkan karena komitmen dan prakarsa nasional terabaikan dari hari ke hari dalam berbagai interaksi kecil, dan orang terus saja menyuap dan memeras. Prakarsa pemerintah untuk mengurangi korupsi kemudian disambut dengan skeptisisme.

Dalam membangun tata kelola yang demokratis di Negara Indonesia , sebelum mereformasi hal-hal yang penting, model pemerintahan dan hubungan bisnis harus direformasi lebih dahulu. Di banyak negara berkembang, model tersebut sederhana saja, yakni pendekatan atas-bawah. Pemerintah mengidentifikasi prioritas dan menyusun kebijakan sendiri, sementara masyarakat bisnis sekedar menunggu keputusan pemerintah. Dalam model semacam itu tidak ada kepastian, karena pemerintah dapat mencabut kebebasan berbisnis semudah ia memberinya. Begitu pula, reformasi yang dilakukan dengan cara demikian seringkali gagal untuk mengatasi berbagai cacat yang ada dalam sistem tersebut.

Keterlibatan sektor bisnis dalam reformasi sangat penting, dan agar model seperti itu terwujud maka sebuah dialog

antara swasta dan publik harus dilakukan, di mana masyarakat bisnis memiliki kesempatan untuk membantu proses pembuatan kebijakan. Bisnis dalam segala ukuran mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam pembangunan yang demokratis, dan tidak dapat dipaksa untuk mengikuti reformasi tanpa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyusun undang-undang dan per-aturan. Sejarah mengajarkan bahwa pendekatan akar rumput dalam reformasi lebih efektif dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan.

Upaya reformasi harus memberikan prioritas yang tinggi pada transparansi dan pengembangan mekanisme yang membuka akses publik yang memadai terhadap, serta menjamin lancarnya arus, informasi. Transparansi menjadi penting karena ia menjadikan penerapan hukum secara pilih-pilih, dan juga penyalahgunaan jabatan publik, sulit untuk disembunyikan. Sistem penyediaan segala macam informasi melalui internet (*e-govern-ment*) sekarang menjadi semakin populer sebagai cara yang efektif untuk ineningkatkan transparansi dan menambah akses kepada informasi. Sistem semacam itu tidak hanya mengurangi kesempatan untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memperbaiki efisiensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada kons-tituen.

Akhirnya, seperti kata Douglass North, tidak ada satu model pendekatan yang bisa berlaku untuk semua negara. Negara-negara berbeda dalam hal kebudayaan dan sejarahnya, di samping tingkat perkembangan politik dan ekonominya. Oleh karena itu, lembaga tidak dapat diimpor dari negara lain, tetapi harus dibangun dengan memperhitungkan hukum-hukum formal dan informal yang dapat membuat sistem politik dan pasar tertentu berjalan. Namun demikian, satu faktor yang harus diterapkan oleh setiap negara adalah

pendekatan reformasi lembaga-lembaga hendaknya membantu membangun suatu sistem yang adil dimana setiap orang bermain aturan dan di mana insentifnya terstruktur dengan baik sehingga mereka yang taat pada aturan akan merasakan manfaatnya. "Aturan main" ini hendaknya tidak dipaksakan oleh pemerintah, melainkan dibangun secara hati-hati melalui dialog kreatif antara sektor publik dan swasta.

Kesimpulan

Di Indonesia gerakan yang mempertanyakan manfaat dan legitimasi globalisasi, gerakan anti-demokrasi saat ini juga dipicu oleh kenyataan bahwa orang melihat sedikit manfaat dari sistem demokrasi. Tetapi frustrasi rakyat terhadap demokrasi adalah, pada hakikatnya, frustrasi terhadap tiadanya peluang ekonomi. Solusinya, oleh karena itu, tidak terletak pada rezim otoritarian, seperti diduga oleh sebagian orang. Tetapi, solusi itu terletak pada berfungsinya perekonomian dan sistem demokrasi, sebagaimana tata kelola yang baik dan pasar yang efisien dapat membantu rakyat untuk mewujudkan potensi ekonomi mereka. Demokrasi adalah sebuah proses, dan hasilnya tidak akan terlihat dalam sekejap. Jadi demokrasi jangan dibuang, tetapi harus ada usaha untuk memperkuatnya dengan cara memperbaiki tata kelola dari hari ke hari, dari pemilihan umum yang satu ke yang berikutnya.